



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KEUANGAN

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021

(Audited)

 balaibahasa.jawatimur

 Balai Bahasa Jawa Timur

 @BB Jatim

 balaibahasajatim.kemdikbud.go.id

 Kemendikbud

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan (Audited) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sidoarjo, Desember 2021

Kepala,


Dr. Asrif, M. Hum.
NIP. 197709022006041001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum.....	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	9
A.5 Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan.....	18
B.2 Belanja Negara	19
B.3 Belanja Pegawai	20
B.4 Belanja Barang	21
B.5 Belanja Modal	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	25
C.1 Aset Lancar	25
C.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran.....	25
C.1.2. Kas Bendahara Penerimaan.....	26
C.1.3. Persediaan	26
C.2 Aset Tetap.....	27
C.2.1 Peralatan dan Mesin.....	28
C.2.2 Gedung dan Bangunan	28
C.2.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	29
C.2.5 Aset Tetap Lainnya.....	30

C.2.5 Kontruksi dalam Pengerjaan	30
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.2.7 Ekuitas.....	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	31
D.2 Beban Pegawai.....	31
D.3 Beban Persediaan	32
D.4 Beban Barang dan Jasa	32
D.5 Beban Pemeliharaan	32
D.6 Beban Perjalanan Dinas	33
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	33
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.9 Kejiata Non Operasional.....	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
E.1 Ekuitas Awal	36
E.2 Surplus/Defisit LO	36
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	37
E.4 Koreksi Menambah/mengurangi Ekuitas	37
E.5. Transaksi Antar Enitas	39
E. 6 Ekuitas Akhir	39
Lampiran.....	40

VI. Lampiran:

1. DIPA 2021
2. RKAKL Revisi Terakhir 2021
3. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN
4. Laporan Elektronik Rekon Bulan Desember 2021
5. Laporan dari Aplikasi SAIBA Bulan Desember 2021
6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desember 2021
7. Laporan Rekening Koran Desember 2021
8. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dengan SIMAK BMN 2021
9. Laporan Barang Milik Negara 2021
10. Laporan Penyusutan Barang Milik Negara 2021
11. Laporan Persediaan 2021

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan hasil sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sidoarjo, Desember 2021

Kepala
Drs. Asrif, M. Hum.

NIP 197709022006041001

Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama Tahun 2021.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.535.016,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.861.624.950 atau mencapai 98,21% dari alokasi anggaran sebesar. Rp6.986.535.000,-

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun Anggaran 2021.

Nilai Aset per Tahun Anggaran 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.184.800.310;- yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar Rp17.509.123; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.167.219.187; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp00,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per Tahun Anggaran 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.184.800.310 yang terdiri atas: Kewajiban sebesar Rp0,00 dan Ekuitas sebesar Rp3.184.800.310;-

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar

Rp5.535.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.041.980.816;-, sehingga terdapat defisit dari kegiatan oprasional senilai Rp(7.036.445.816) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp16,00 dan mengalami Defisit-LO sebesar Rp(0,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(7.036.445.800).

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.365.155.676,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(7.036.445.800) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.856.089.934,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.184.800.310. Terjadi penurunan Ekuitas senilai Rp(180.355.366).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode awal tahun dari 1 Januari—31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021		%
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	5,535,000	0
JUMLAH PENDAPATAN		-	5,535,000	
BELANJA	B.2.			
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	B.3	3,388,871,000	3,374,490,920	100
Belanja Barang	B.4	3,397,664,000	3,288,499,870	97
Jumlah Belanja Operasi		6,786,535,000	6,662,990,790	98
Belanja Modal				
Belanja Modal	B.5	200,000,000	198,634,160	99
Jumlah Belanja Operasi		200,000,000	198,634,160	99
JUMLAH BELANJA		6,986,535,000	6,861,624,950	98

II. NERACA

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
NERACA
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	17,509,123	22,730,316
Jumlah Aset Lancar		17,509,123	22,730,316
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	2,689,277,450	2,493,638,290
Gedung dan Bangunan	C.2.2	1,862,701,000	1,862,701,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.3	260,747,000	260,747,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	413,871,705	413,871,705
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.5	441,262,600	441,262,600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6	(2,500,568,568)	(2,126,507,592)
JUMLAH ASET TETAP		3,167,291,187	3,345,713,003
JUMLAH ASET		3,184,800,310	3,368,443,319
KEWAJIBAN	C.3		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pihak Ketiga	C.3.1	-	3,287,643
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	3,287,643
JUMLAH KEWAJIBAN		-	3,287,643
EKUITAS	C.4.	3,184,800,310	3,365,155,676
Ekuitas		3,184,800,310	3,365,155,676
JUMLAH EKUITAS		3,184,800,310	3,365,155,676
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,184,800,310	3,368,443,319

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	5,535,000	113,395,000
JUMLAH PENDAPATAN		5,535,000	113,395,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,374,490,920	3,286,871,492
Beban Persediaan	D.3	93,000	138,378,357
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,915,916,671	1,646,250,289
Beban Pemeliharaan	D.5	221,927,800	145,087,139
Beban Perjalanan Dinas	D.6	961,083,356	987,140,700
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	194,408,093	62,219,804
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	374,060,976	462,971,245
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		7,041,980,816	6,728,919,026
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7,036,445,816)	(6,615,524,026)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Pendapatan pelepasan aset non lancar		-	77,990,499
Beban pelepasan aset non lancar		-	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	77,990,499
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya		16	4,690,629
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	179,996
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		16	4,510,633
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		16	82,501,132
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7,036,445,800)	(6,533,022,894)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(7,036,445,800)	(6,533,022,894)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	3,365,155,676	3,521,690,513
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,036,445,800)	(6,533,022,894)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	500	7,539,430
Penyesuaian Nilai Aset	E.5		-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.6	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.7		
Koreksi Nilai Persediaan	E.8	500	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.9	-	61,650,000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.10	-	(54,110,570)
Lain-lain	E.11	-	-
Jumlah			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.12	6,856,089,934	6,368,948,627
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.13	(180,355,366)	(156,534,837)
EKUITAS AKHIR		3,184,800,310	3,365,155,676

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kelola balai. Organisasi unit kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Jawa Timur
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkajian bahasa dan sastra;
 - b. pemetaan bahasa dan sastra;
 - c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
 - e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur memiliki visi yang akan dicapai pada tahun 2021, yaitu “terwujudnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga penelitian yang unggul dan pusat informasi serta pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan (Indonesia dan daerah) di Provinsi Jawa Timur.” Sedangkan misi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatkan mutu bahasa dan sastra, mengembangkan bahan informasi kebahasaan dan kesastraan, mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan semester 1 (satu) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN dan SIMAN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar

nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah per tanggal pelaporan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur adalah Pendapatan Jasa UKBI diakui setelah UKBI dilaksanakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

<i>Aset</i>	(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
<i>Aset Lancar</i>	Aset Lancar • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andai. • Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surata Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan dan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1. Tanah;
 - 2. Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat berupa: Software computer, Lisensi dan franchise, Hak Paten dan Hak Cipta, dan Hasil Kajian.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

- Amortisasi adalah alokasi haraga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
- Amortisasi ATB degan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau factor hukum atau factor ekonomis mana yang lebih pendek

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang masih Harus Dibayar, Pendpaatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp5.535.000,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.535.000,-. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1.1
Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	Pendapatan Pengembangan SDM		5,535,000	-
2	Penerimaan kembali Belanja PegTAYL		Rp 16	-
Jumlah		Rp -	Rp 5,535,016	-

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berasal antara lain dari pendapatan pengembangan SDM yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebesar Rp5.535.000,-, dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp16,-.

Tabel B.1.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per Desember 2021 dan Desember 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %	%
Pendapatan Pengembangan SDM	5,535,000.00	113,395,000	(107,860,000)	(1,949)
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	-	77,990,499	0.00	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi		-	0.00	
Penerimaan Kembali Belanja Peg TAYL	16	370,629	2,316,431.25	
Jumlah	5,535,016	191,756,128	3,464.42	

Realisasi Belanja
Rp6.861.624.950,-

2. Belanja Negara

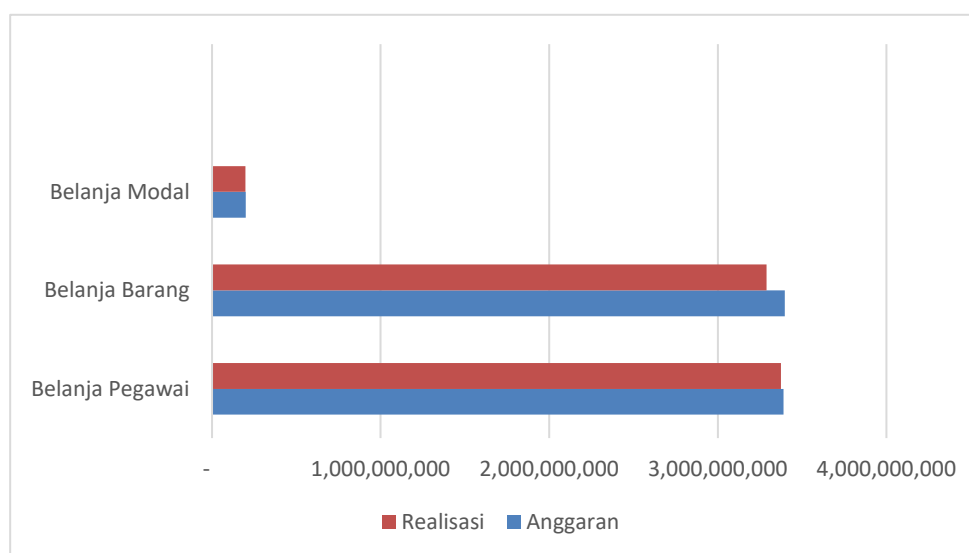
Realisasi belanja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.861.624.950,- atau sebesar 98,21% dari anggarannya sebesar Rp6.986.535.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B.2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3,388,871,000	3,374,490,920	99.58
52	Belanja Barang	3,397,664,000	3,288,499,870	96.79
53	Belanja Modal	200,000,000	198,634,160	99.32
	Jumlah	6,986,535,000	6,861,624,950	98.21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik B.2 berikut ini.



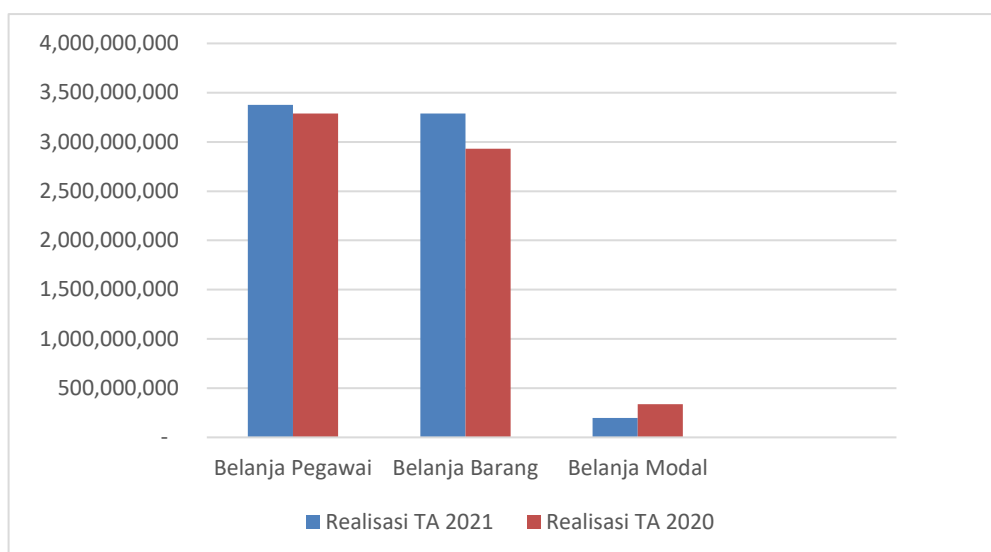
Perbandingan realisasi belanja per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel B.2.2
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,374,490,920	3,286,871,492	2.67
Belanja Barang	3,288,499,870	2,929,750,343	12.25
Belanja Modal	198,634,160	337,520,000	(41.15)
Jumlah	6,861,624,950	6,554,141,835	4.69

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4,69 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain berkurangnya anggaran pada tahun 2020.

Komposisi realisasi tahun anggaran 2020 dan 2021, terlihat pada grafik B2.2.:



Realisasi Belanja Pegawai
Rp3.374.490.920,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per Tahun Anggaran **2021 dan Tahun Anggaran 2020** adalah masing-masing sebesar Rp3.374.490.920,- dari pagu Rp3.388.871.000,- dan **Rp3.286.871.492** dari pagu Rp3.299.486.00,-. Terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 2,67% dibandingkan tahun anggaran 2020. dikarenakan adanya penambahan pegawai pada bulan September 2021.

Tabel B.2.1.1
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,353,885,777	3,290,383,519	63,502,258	1.93
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan				n
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan				∞
5121	Belanja Honorarium				∞
5122	Belanja Lembur	22,310,000	-	22,310,000	∞
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito				-
Realisasi Belanja Bruto		3,376,195,777	3,290,383,519	85,812,258	2.61
Pengembalian Belanja Pegawai		(1,704,857)	(3,512,027)		∞
Realisasi Belanja Neto		3,374,490,920	3,286,871,492	87,619,428	2.67

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang
Rp3.288.499.870,-

Realisasi Belanja Barang per Tahun Anggran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.288.499.870,- dan Rp2.929.750.343,- mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai 30,78%, pada pertengahan tahun.

Perbandingan Rincian Belanja Barang Per Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel B.2.2.1
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang
Per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2021	TA 2020	%
5211	Belanja Barang Operasional	463,767,056	456,932,992	1.50
5212	Belanja Barang Non Operasional	707,973,178	884,749,637	(19.98)
5218	Belanja Barang Persediaan	189,279,400	-	-
5221	Belanja Jasa	745,469,080	1,255,561,135	(40.63)
5231	Belanja Pemeliharaan	221,927,800	302,822,932	(26.71)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	998,782,356	1,543,130,039	(35.28)
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	-	617,515,500	-
Realisasi Belanja Bruto		3,327,198,870	5,060,712,235	(34.25)
Pengembalian Belanja Barang		(38,699,000)	(25,613,300)	-
Realisasi Belanja Neto		3,288,499,870	5,035,098,935	(34.69)

Penurunan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu disebabkan karena adanya penurunan pada pagu belanja barang;

Adapun perbandingan realisasi Belanja Barang per tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 dalam tabel berikut ini:

Tabel B.2.2.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2021			TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	465,147,000	463,767,056	99.70	590,060,000	247,655,200	41.97
5212	Belanja Barang Non Operasional	739,850,000	707,973,178	95.69	546,556,000	98,269,939	17.98
5218	Belanja Barang Persediaan	196,760,000	189,279,400	96.20	25,140,000	-	0.00
5221	Belanja Jasa	779,560,000	745,469,080	95.63	748,200,000	296,022,668	39.56
5231	Belanja Pemeliharaan	227,076,000	221,927,800	97.73	155,955,000	94,075,000	60.32
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,397,664,000	998,782,356	29.40	1,228,206,000	520,606,053	42.39
Pengembalian Belanja Barang			38,699,000	∞		3,249,947	∞
Jumlah		5,806,057,000	3,288,499,870	56.64	3,294,117,000	1,256,628,860	38.15

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja

Modal Rp198.634.160,-

Realisasi Belanja Modal per Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp198.634.160,- atau 99,32% dari pagu sebesar Rp200.000.000,- dan Rp337.520.000,- atau 97,79% dari pagu sebesar Rp345.138.000.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel B.2.3.
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198,634,160	333,000,000	(134,365,840)	(40.35)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	2,280,000	-	-
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	2,240,000	-	-
Realisasi Belanja Bruto	198,634,160	337,520,000	(134,365,840)	(39.81)
Pengembalian Modal	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	198,634,160	337,520,000	(134,365,840)	(39.81)

Penurunan realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(138.885.840);- atau (39,81%), disebabkan adanya alokasi anggaran yang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp198.634.160 atau 99,32% dari pagu Rp200.000.000, dan Rp333.000.000 atau 97.17% dari pagu Rp340.578.000. mengalami penurunan sebesar (40,35%), hal ini dikarenakan adanya penurunan alokasi anggaran.

Tabel B.2.3.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198,634,160	333,000,000	(134,365,840)	(40.35)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ekstrakomtebel	0	0		
Realisasi Belanja Bruto	198,634,160	333,000,000	(134,365,840)	(40.35)
Pengembalian Modal	-	-	-	
Realisasi Belanja Neto	198,634,160	333,000,000	(134,365,840)	(40.35)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.634.160;- , adanya penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp(134.365.840).

B.2.3.2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebenar Rp0;- dan Rp2.280.000;- hal ini dikarenakan sudah tidak ada alokasi untuk belanja modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Tennis Peralatan dan Mesin.

Tabel B.2.3.2.2
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Upah tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis
Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	2,280,000	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	2,280,000	-	-
Pengembalian Modal	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	2,280,000	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Perjalan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing sebesar Rp0;- dan Rp2.240.000;- hal ini dikarenakan tidak ada alokasi untuk belanja modal Perjalanan Peralatan dan Mesin.

Tabel B.2.3.2.2
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ (Turun) (Rp.)	%
Belanja Modal Perjalan Peralatan dan Mesin	0	2,240,000	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	2,240,000	-	-
Pengembalian Modal	-	-	-	-
Realisasi Belanja Neto	-	2,240,000	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp17.509.123,-

C.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.509.123,-. Dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp22.730.316 terjadi penurunan sebesar Rp(5.221.193) ,- atau -23%.

Rincian Aset Lancar pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No	Aset Lancar	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Persediaan	17,509,123	22,730,316	(5,221,193)	-23%
2				-	-
3		-	-	-	-
Jumlah		17,509,123	22,730,316	(5,221,193)	-23%

Selanjutnya dibawah ini dijelaskan rincian per jenis Aset Lancar sebagai berikut:

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,-

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,- . Rincian Kas di Bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2021	TA 2020
1	Rekening Bank		
2	Uang Tunai	-	-
Jumlah		-	-

Perkembangan penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal 31 Desember 2020(neraca) dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Bank	Tgl setor	Penyetoran	NTPN	Saldo setelah tanggal
1	Rekening Bank				
2	Uang Tunai	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang sudah disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,-. Berikut perbandingan rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel C.1.2.1
rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Per Desember 2021
(dalam rupiah)

No	Keterangan	Desember 2021
1	Uang Tunai	-
2	Rekening Bank	-
Jumlah		-

Perkembangan penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan setelah tanggal 31 Desember 2021 (neraca) dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Bank	Tgl Setor	Penyetoran	NTPN	Saldo Setelah
BNI				-
		-		-
Jumlah		-		-

Persediaan
Rp17.509.123,-

C.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan Per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.509.123 dan Rp22.730.316,- pada tahun anggaran 2020. Rincian per jenis persediaan Per 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1.4.1
Rincian Per Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun 2020	Kenaikan (penurunan)	persentase
Barang Konsumsi	-	92,500.00	(92,500.00)	-100
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat				
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat				
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	17,509,123	22,637,816	(5,128,693.00)	-23
Bahan Baku				
JUMLAH	17,509,123	22,730,316	-5,221,193	-123

Tidak terdapat mutasi kurang atau mutasi tambah pada periode ini, dan semua keadaan barang dalam keadaan baik.

Pada saldo persediaan terdapat barang diserahkan kepada masyarakat pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan rincian per akun sebagai berikut:

NO	TAHUN	ASET UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT					JUMLAH
		PERALATAN & MESIN	ASET TETAP LAINNYA	BARANG PERSEDIAAN LAINNYA	TANAH & BANGUNAN	ASET LAIN-LAIN	
1	2017	2,398,047,990	314,653,905	139,800,900	2,951,287,000		5,803,789,795
2	2018	2,599,842,990	3,648,858,905	209,894,100	2,660,492,000		9,119,087,995
3	2019	2,156,118,290	413,871,705	64,564,700	1,863,007,000		4,497,561,695
4	2020	2,493,638,290	413,871,705	22,637,816	1,862,701,000		4,792,848,811
5	2021	2,689,277,450	413,871,705	33,991,623	1,862,701,000		4,999,841,778.00
	JUMLAH	9,647,647,560	4,791,256,220	436,897,516	9,337,487,000	-	24,213,288,296

Aset Tetap
Rp3.166.916.224,-

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset Tetapper 31 Desember 2021 dan Tahun Anggran 2020 sebesar Rp3.166.916.224,- dan Rp3.345.713.003,-. Dibandingkan Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp (178.796.779,-) atau (5,34)%.

Rincian Aset Tetap pada Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Per 31 Desember 2021 dan Tahun Anggaran 2020 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel C.2.1
Rincian Aset Tetap
Per Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020
(dalam rupiah)

No	Jenis	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	2,689,277,450	2,493,638,290	195,639,160	7.85
2	Gedung dan Bangunan	1,862,701,000	1,862,701,000	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	260,747,000	260,747,000	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	413,871,705	413,871,705	-	-
5	Konstruksi dalam Pengerjaan	441,262,600	441,262,600	-	-
Jumlah		5,667,859,755	5,472,220,595	195,639,160	3.58
Akumulasi Penyusutan		(2,500,568,568)	(2,126,507,592)	(374,060,976)	17.59
Nilai Buku Aset Tetap		3,167,291,187	3,345,713,003	(178,421,816)	(5.33)

Peralatan dan Mesin
Rp2.68.277.450-

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Desember 2021 dan Desember Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.689.277.450,- dan sebesar Rp2.493.638.290,- Terdapat kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp195.639.160 atau 7,85%, mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2,493,638,290
Mutasi tambah:	
Pembelian	195,639,160
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	2,689,277,450
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	2,100,792,782
Nilai Buku per 31 Desember 2021	588,484,668

Gedung dan Bangunan
Rp1.862.701.000,-

C.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan Desember 2020 adalah Rp1.862.701.000 dan Rp1.862.701.000,-. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,862,701,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2020	1,862,701,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	254,004,686
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1,608,696,314

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp260.747.000

C.2.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah Rp260.747.000,- dan Rp260.747.000, tidak terdapat penurunan atau kenaikan dari nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	260,747,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi Nilai Aset	0
Saldo per 31 Desember 2021	260,747,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai buku per 31 Desember 2021	260,747,000

Aset Tetap Lainnya
Rp413.871.705,-

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan antara lain aset tetap renovasi dan aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah sebesar Rp413.871.705,- dan Rp413.871.705-Tidak terdapat kenaikan atau penurunan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp0,-) atau (0%).

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	413,871,705
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2021	413,871,705
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	0
Nilai buku per 31 Desember 2021	413,871,705

Konstruksi dalam Pengerjaan
Rp441.262.600

C.2.5 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp441.262.600,- .

Konstruksi dalam Pengerjaan merupakan Aset yang sedang dalam proses pembangunan, pembangunan aset berupa gedung yang sedang dikembangkan. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dilakukan melalui kontrak pada tahun 2007, tidak terjadi pembangunan lanjutan pada tahun 2008, dikarenakan Pusat (Kemdikbud) tidak menyetujui pengajuan anggaran pembangunan lanjutan gedung. Tahun 2019 menjadi

temuan BPK disebabkan pembangunan terhenti atau gedung yang mangkrak sehingga disebut Kontruksi Dalam Pengerjaan.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp2.500.568.568)*

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing Rp(2.500.568.568-) dan Rp(2.126.507.592,-).

*Ekuitas
Rp3.184.800.310,-*

C.2.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.184.800.310,- dan Rp3.365.155.676,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp5.535.000,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Desember 2021 dan Desember 2020 adalah sebesar Rp5.535.000,- dan Rp113.395.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1.1
Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Pengembangan SDM	5,535,000	113,395,000	(107,860,000)	(95.12)
			0	
Jumlah	5,535,000	113,395,000	(107,860,000)	(95.12)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp3.374.490.920,-

Jumlah Beban Pegawai per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.374.490.920,- dan Rp3.286.871.492,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2.1
Rincian Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,155,957,860	2,131,602,140	24,355,720	1.14%
Beban Pembulatan Gaji PNS	33,335	31,062	2,273	7.32%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	174,139,506	173,176,732	962,774	0.56%
Beban Tunj. Anak PNS	46,197,814	43,816,682	2,381,132	5.43%
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	19,789,480	5,410,520	27.34%
Beban Tunj. Fungsional PNS	417,060,000	421,295,000	(4,235,000)	-1.01%
Beban Tunj. PPh PNS	20,894,795	20,919,416	(24,621)	-0.12%
Beban Tunj. Beras PNS	126,952,260	106,022,880	20,929,380	19.74%
Beban Uang Makan PNS	330,710,350	315,653,100	15,057,250	4.77%
Beban Tunjangan Umum PNS	55,035,000	54,565,000	470,000	0.86%
Beban Uang Lembur	22,310,000	-	22,310,000	0.00%
Jumlah	3,374,490,920	3,286,871,492	87,619,428	2.67%

Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp87.622.428,- atau 2,67% jika dibandingkan dengan beban pegawai periode 31 Desember 2020.

Beban Persediaan
Rp93.000,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp93.000,- dan Rp138.378.357,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel D.3.1
Rincian Beban Persediaan
Tahun Anggran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	RALISASI 31 Desember 2020	NAIK (TURUN)	%
Persediaan konsumsi	93,000	138,378,367	(138,285,367)	99,93%
Beban Persediaan Bahan Baku		0	0	
Jumlah	93,000	138,378,367	(138,285,367)	99,93%

Jumlah Beban Persediaan periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(138.285.357),- atau (99,93%) jika dibandingkan dengan beban persediaan periode 31 Desember 2020.

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.915.916.671,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.915.916.671,- dan Rp1.646.250.289,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4.1
Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Keperluan Perkantoran	336,035,156	196,241,754	139,793,402	71%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	59,530,000	(59,530,000)	-100%
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,531,900	6,559,225	(1,027,325)	-16%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119,800,000	133,415,000	(13,615,000)	-10%
Beban Barang Operasional Lainnya	-	5,000,000	(5,000,000)	-100%
Beban Barang Operasional Lainnya- Penanganan Pandemi COVID-19	2,400,000	6,749,400	(4,349,400)	-64%
Beban Bahan	290,005,144	191,794,998	98,210,146	51%
Beban Honor Output Kegiatan	213,238,000	53,530,000	159,708,000	298%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	194,580,034	179,764,267	14,815,767	8%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,150,000	728,000	9,422,000	1294%
Beban Langganan Listrik	41,949,302	40,699,640	1,249,662	3%
Beban Langganan Telepon	19,863,095	3,560,505	16,302,590	458%
Beban Jasa Pos dan Giro	6,726,000	-	6,726,000	0%
Beban Sewa	66,900,000	67,400,000	(500,000)	-1%
Beban Jasa Profesi	303,100,000	433,907,500	(130,807,500)	-30%
Beban Jasa Lainnya	258,175,040	216,950,000	41,225,040	19%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	44,468,000	50,420,000	(5,952,000)	-12%
Beban Aset Ekstrakontabel Peralatan dan Mesin	2,995,000	-	2,995,000	0%
Jumlah	1,915,916,671	1,646,250,289	269,666,382	16,38

Beban Pemeliharaan
Rp.221.927.800,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp221.927.800,- dan Rp145.087.139,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5.1
Rincian Beban Pemeliharaan
per Desember 2021 dan Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130,331,500	71,550,000	58,781,500.00	82.15
Beban Pemeliharaan Gdug dan Bangunan-penanganan COVID-19	0	5,000,000	(5,000,000.00)	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91,596,300	68,537,139	23,059,161.00	33.64
Jumlah	221,927,800	145,087,139	76,840,661	-100.00

Beban Perjalanan
Dinas Rp961.083.356

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan Desember adalah masing-masing sebesar Rp961.083.256,- dan Rp987.140.700,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6.1
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Pengurangan	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	401,753,958	670,963,200	(269,209,242.00)	(40.12)
Beban Pejalanan Dinas Dalam Kotaa	35,550,000	70,300,000	(34,750,000.00)	(49.43)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Kota	340,740,000	153,437,500	187,302,500.00	122.07
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	183,040,000	92,440,000	90,600,000.00	98.01
Jumlah	961,083,958	987,140,700	(26,056,742)	(2.6)

,-Beban Barang
untuk Diserahkan ke
Masyarakat
Rp194.408.093

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp194.408.093,- dan Rp62.219.804,-Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7.1
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Persediaan Lainny	194,408,093	62,219,804	132,188,289.00	212.45
Belanja Modal BLU	0	0	0.00	0.00
Jumlah	194,408,093	62,219,804	132,188,289	212

,-

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp374.435.939,-

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Lain-lain per Desember 2021 dan Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp374.435.939,- dan Rp462.971.245,-. Beban Penyusutan dan Amortiasi merupakan beban yang timbul karena penyusutan dan amortisasi.

zTabel D.8.1
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	313,977,366	383,683,968	(69,706,602.00)	-0.18
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	56,445,485	56,445,486	(1.00)	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	19,203,666	(19,203,666.00)	-1.00
Beban Penyusutan Jaringan	3,638,125	3,638,125	-	0.00
Jumlah	56,445,485	56,445,486	(1.00)	(0.00)

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp,-

D.9. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel D.9.1
Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Suplus/Defisit dari Kegiatan Oprasional	(7,036,445,816)	(6,615,524,026)	0.063626
KEGIATAN NON OPRASIONAL	0	-	0.00
Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	0	77,990,499	
Pendapatan pelepasan aset non lancar	0	77,990,499	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	0	77,990,499	0.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	16	4,510,633	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	16	4,690,629	0.00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	179,996	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	16	82,501,132	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(7,036,445,800)	(6,533,022,894)	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 1 Januari 2021, Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp3.385.155.676,00. pada tahun 2020 sebesar Rp3.521.690.513,00. mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp180.355.366,00) sehingga jumlah ekuitas akhir untuk periode yang berakhir Desember 2021 adalah sebesar Rp3.184.800.310,00-. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.1
Perbandingan Rincian Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK/TURUN	%
Ekuitas Awal	Rp 3,365,155,676	Rp 3,521,690,513	Rp (156,534,837)	(4.4)
Surplus/Defisit LO	Rp (7,036,445,800)	Rp (6,533,022,894)	Rp (503,422,906)	7.7
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	Rp 500	Rp 7,539,430	Rp (7,538,930)	(100)
Penyesuaian Nilai Aset	Rp -	Rp -	Rp -	∞
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 500	Rp -	Rp 500	∞
Koreksi Atas Reklasifikasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
Selisih Revaluasi Aset	Rp -	Rp 61,659,000	Rp (61,659,000)	(100.00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Rp -	Rp (54,110,570)	Rp 54,110,570	(100.00)
Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	∞
Transaksi antar entitas	Rp 6,856,089,934	Rp 6,368,948,627	Rp 487,141,307	7.65
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	Rp (180,355,866)	Rp (156,534,837)	Rp (23,820,529)	15.22
Ekuitas Akhir	Rp 3,184,800,310	Rp 3,365,155,676	Rp (180,355,366)	(5.36)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.365.155.676,- dan Rp3.521.690.513,-. Penurunan nilai ekuitas awal tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar (Rp156.534.837),-.

E.2 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional (LO)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Desember 2021 dan Desember 2020 adalah sebesar Rp(7.036.445.800) dan Rp(6.533.022.894). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Ekuitas Awal
Rp3.365.155.676,00.

Surplus/(Defisit) LO
(7.036.445.800)

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0,-

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revolusi Aset tetap.

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Koreksi yang
Menambah atau
Mengurangi Ekuitas
Rp500,-

E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp,500,- dan Rp7.539.430,-

Tabel E.2
Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas
Tahun 2021

(dalam rupiah)

	URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK/TURUN
E.4.1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
E.4.2	Koreksi Nilai Persediaan	500	7,539,430	(7,538,930)
E.4.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset	-	61,659,000	(61,659,000)
E.4.5	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	(54,110,570)	54,110,570
E.4.6	Lain-lain	-	-	-
E.4.7	Anggaran yang lalu	-	-	-
	JUMLAH	500	15,087,860	(15,087,360)

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0,-

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir. Tidak terdapat saldo penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp500,-

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian atau pencatatan persediaan yang terjadi pada per Tahun Anggaran 2021. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020. masing-masing adalah sebesar Rp500,- dan Rp0,-.

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0,-

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi pada persediaan/aset tetap/aset lainnya. Saldo koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir September 2021 dan Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020 Rp0,- dan Rp61.650.000,- dan pada periode ini tidak ada Selisih Revaluasi Aset Tetap.

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp0,-

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan yang tidak berasal dari kegiatan revaluasi. Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp(54.110.570),-. Pada periode ini tidak ada kenaikan/penurunan pada koreksi nilai aset non revaluasi.

Lain-lain
Rp0,-

E.4.6 Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi untuk menyesuaikan saldo anggaran maupun saldo ekuitas. Koreksi lain-lain untuk periode periode yang berakhir Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.5 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp6.856.089.934,-*

Jumlah transaksi Antar Entitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp6.856.089.934 dan 6.368.948.627,- terjadi kenaikan pada transaksi antar entitas sebesar Rp487.141.307,-

E.5.1 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan Penurunan
Ekuitas
Rp(180.355.366)*

Jumlah Penurunan Ekuitas yang berakhir pada Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp(180.355.366),- dan Rp(156.534.837).

E.6 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp3.184.800.310,-*

Nilai Ekuitas per tanggal untuk periode yang berakhir **Desember 2021** dan Desember **2020** masing-masing adalah sebesar **Rp3.184.800.310,-** dan **Rp3.365.155.676.**